
RANCANGAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019



INSPEKTORAT KOTA SUNGAI PENUH

Jl. Gajah Mada Rt. 10 Dusun Malwan Desa Aur Duri Kec. Pondok Tinggi

No. 900/07 /Inspektorat-1/I/2018

KATA PENGANTAR

Bersyukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Kerja Inspektorat Kota Sungai Penuh Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Renja Inspektorat Kota Sungai Penuh Tahun 2019 ini memberikan informasi rencana kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Kota Sungai Penuh yang akan dilaksanakan tahun 2019 untuk mendukung penerapan *good governance* yang mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini. Kami berharap Rencana Kerja ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Sungai Penuh Tahun 2019 sebagai upaya penyempurnaan kinerja Inspektorat Kota Sungai Penuh di masa mendatang. Semoga semua daya upaya kita dalam membangun **KOTA SUNGAI PENUH CERDAS 2021** senantiasa memperoleh petunjuk serta ridha Allah, SWT.

Sungai Penuh, 5 APRIL 2018

INSPEKTUR


SUHATRIL, SH, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19720515 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2017 dan Capaian Renstra Inspektorat	15
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2017	15
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2018	35
2.1.3 Capaian Renstra 2001 – 2016	35
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	39
2.4 Reviu terhadap RKPD 2017	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	57
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	57
3.1.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	57
3.1.2 Telaah terhadap Kebijakan Provinsi/Daerah	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat	67
3.3 Program dan Kegiatan	68
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	92
Bab IV PENUTUP	102
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Sungai Penuh	3
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018	16
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Sungai Penuh	37
Tabel 2.3	Reviu Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2019 Inspektorat Kota Sungai Penuh	46
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Sungai Penuh	81
Tabel 4.1	Rencana Kerja Inspektorat Kota Sungai Penuh Tahun 2015	88



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hubungan Visi, Misi, tujuan dan Target Sasaran Tahun 2016-2021

Inspektorat Kota Sungai Penuh

Lampiran 2 Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kerangka Kebutuhan Dana

Inspektorat Kota Sungai Penuh 2016 - 2021

Lampiran 3 Realisasi Indikator Kinerja Program RPJMD Inspektorat Kota Sungai Penuh



- 1) Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat pengawasan;
- 2) Meningkatnya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahun maka Inspektorat Kota Sungai Penuh menjabarkannya dalam sasaran berikut ini:

1. meningkatkan kompetensi dan pemahaman APIP tentang dasar dan teknik pengawasan;
2. Meningkatnya kualitas laporan hasil pengawasan;
3. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang taat pada hukum dan peraturan;
4. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang tepat waktu;
5. Terwujudnya birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani dengan terciptanya sistem pengendalian intern yang memadai pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
7. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan SKPD dan masyarakat lingkup Pemerintahan Kota Sungai Penuh.

3.3 Program dan Kegiatan

Misi pertama yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 Kota Sungai Penuh, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, menjadikan Inspektorat Kota Sungai Penuh sebagai pengawas penyelenggara pemerintah yang harus menunjang tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sungai Penuh sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Inspektorat berwenang dalam membina dan mengawasi setiap SKPD sebagai penyelenggara pemerintahan agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdedikasi tinggi dan bersih dari KKN, sertamanajemen dan sistem pemerintahan yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel, didukung dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Diharapkan dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik tersebut harus memenuhi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja birokrasi secara profesional dalam menjalankan fungsi pemerintahan ditetapkan sasaran yaitu **terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik**, yang ditandai dengan:

- 1) Makin efektifnya pelaksanaan otonomi daerah
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 3) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN
- 4) Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi
- 5) Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi
- 6) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- 7) Sinkronnya rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- 8) Meningkatnya kualitas produk hukum daerah

Inspektorat Kota Sungai Penuh dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2019 untuk Pelaksanaan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian menetapkan 8 (delapan) program, sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- 7) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 8) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Berikut ini penjelasan kegiatan masing-masing program Inspektorat Kota Sungai Penuh yang merupakan penjabaran tabel 3.1 mengenai Rencana Kerja Inspektorat Kota Sungai Penuh Tahun 2018, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima di bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan prima dan peningkatan pengelolaan barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran kegiatan sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan penyediaan surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar Instansi dimana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat menyurat sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dan memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini mengarah kepada belanja pegawai dimana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran berjalan.

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang dinamis diperlukansuatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi

perkantoran, oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk personil/pegawai dalam melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun anggaran.

1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam mengelola administrasi dan hasil temuan pengawasan dan kebutuhan penggandaan/fotokopi beberapa dokumen sesuai dengan kebutuhan.

1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan dalam gedung perkantoran.

1.8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga.

1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator hasil kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi perkembangan dalam pelaksanaan SKPD dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan.

1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minuman untuk tamu-tamu dinas dan rapat-rapat dinas yang dilaksanakan SKPD baik intern maupun ektern Inspektorat Kota Sungai Penuh.

1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

Bentuk kegiatan ini mengarah kepada belanja perjalanan dinas personil Inspektorat Kota Sungai Penuh yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dan luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan

1.12 Penyediaan Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini bertujuan untuk belanja pegawai yang mendukung kegiatan administrasi perkantoran.

1.13 Peningkatan dan pengembangan Disiplin Kepegawaian

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan administrasi kepegawaian

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam menunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator-indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Inspektorat Kota Sungai Penuh dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional sebagai sarana penunjang operasional kerja personil dalam SKPD.

2.2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor sebagai pendukung sarana peralatan kegiatan perkantoran.

2.3 Pengadaan Meubeler

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan meubeler sebagai sarana penunjang pelayanan publik dan perlengkapan kerja personil dalam SKPD.

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung kantor dan peralatannya sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran.

2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya biaya *service* dan suku cadang kendaraan dinas operasional satu tahun.

2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Meubeler Gedung Kantor

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah terpeliharanya alat kerja komputer, perbaikan meja dan kursi sarana kerja untuk menunjang kinerja pegawai, dan lain-lain sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran.

2.7 Pengembangan Media Data dan Informasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar tersedianya sarana pendukung dan penunjang kinerja pegawai dengan tersedianya sarana komunikasi publik melalui website kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini mengarah pada peningkatan disiplin kinerja personil Inspektorat. Indikator hasil program ini adalah meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur, kegiatannya adalah:

3.1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya anggaran penyediaan pakaian khusus bagi personil pengawas dalam satu tahun anggaran untuk menunjang peningkatan disiplin pegawai.

4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional maka diperlukan diklat (pendidikan dan latihan) yang merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar dapat mengimbangi tuntutan *clean governance* dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Untuk

itu, indikator dari hasil program ini berbasis kepada peningkatan kompetensi yang relevan dengan tuntutan bidang kerja setiap jenjang jabatan yang ada di lingkungan aparatur. Peningkatan kompetensi ini diharapkan bisa menghasilkan instansi yang berdedikasi dan memiliki wawasan operasional untuk membangun suatu pemerintahan yang baik, sehingga mampu memenuhi tuntutan perubahan dari lingkungannya sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan.

Kegiatan program ini terdiri dari:

4.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertajam kemampuan personil dan penyeragaman Sistem pengelolaan tata administrasi dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan, indikator dari hasil kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan sumber daya manusia dalam pengimplementasian dan perundang-undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Arahan kebijaksanaan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan tanggung jawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan dan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator-indikator kebersihan dan kegagalan pelaksanaan.

Kegiatan dari program ini terdiri dari:

5.1 Penyusunan Program dan Pelaporan

Indikator dari kegiatan ini adalah tersusunnya program-program SKPD dan tersajinya laporan pengelolaan keuangan bulanan, triwulan, dan semester yang akuntabel serta tersusunnya Renstra Inspektorat Kota Sungai Penuh periode 2016-2021 yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Sungai Penuh 2016-2021.

5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Indikator dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dengan baik dan meningkatnya kualitas dokumen-dokumen perencanaan

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini adalah program peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaturan dan penetapan atas pengelolaan keuangan daerah, dengan cara mengidentifikasi apakah peraturan dan penetapan tersebut:

- a. telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, dan
- b. telah memenuhi/mengandung unsur sistem pengendalian intern.

Selain itu, program ini juga merupakan program peningkatan peran serta masyarakat dan SKPD lingkup Kota Sungai Penuh di bidang pengawasan dalam rangka melakukan pemberantasan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Tujuan program ini adalah untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dipatuhi dan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pengawasan dengan SKPD dan masyarakat lingkup Pemerintahan Kota Sungai Penuh.

Kegiatan program ini meliputi:

6.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Reguler)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dalam organisasi pemerintah daerah yang menjadi tugas pokok dalam menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah telah dipatuhi dan

berjalan sesuai dengan rencana dan diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada objek pemeriksaan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pengawasan internal terhadap kepatuhan pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeriksaan Reguler pada SD, Desa, Kecamatan, Puskesmas, UPTD, Kantor, Bagian, Badan dan Dinas di lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. Hasil kegiatan ini adalah tertibnya LHP Pemeriksaan Reguler.

6.2 Pelaksanaan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengawasan atas kasus pengaduan yang diterima dari Aparat Pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan penanganan *Whistle Blowing System* yaitu memberikan kemudahan akses pengaduan masyarakat melalui media website Dumas Inspektorat Kota Sungai Penuh dan Kotak Pengaduan Inspektorat Kota Sungai Penuh.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menangani kasus-kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Keluaran kegiatan ini berupa tertanganinya kasus pengaduan masyarakat dan aparat pemerintah dan tersedianya pelayanan sistem informasi pengaduan masyarakat. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan atas kasus pengaduan yang diterima dari Aparat Pemerintah dan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses pengaduan masyarakat.

6.3 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan ini merupakan kegiatan fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi awal sistem pengendalian internal SKPD/Unit Kerja. Tujuan dari kegiatan ini untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada SKPD/Unit Kerja.

Keluaran dari kegiatan ini adalah fasilitasi/ asistensi/monitoring pelaksanaan SPIP, evaluasi awal Sistem Pengendalian Internal

SKPD/Unit Kerja, penguatan Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja. Hasil kegiatan ini adalah tertibnya Sistem Pengawasan Internal.

6.4 Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan merupakan kegiatan mendata semua hasil temuan pengawasan baik dari hasil pengawasan internal (temuan Inspektorat Kota Sungai Penuh) maupun dari hasil pengawasan eksternal (temuan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data yang akurat mengenai rekapitulasi hasil temuan pengawasan sehingga pendokumentasian laporan hasil pengawasan berjalan dengan tertib, akurat dan tepat guna.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan Ikhtisar Pemeriksaan dan tersedianya *data base* hasil pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tertibnya pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.

6.5 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan merupakan kegiatan yang memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mengetahui permasalahan atau kendala penyelesaian bagi permasalahan objek pemeriksaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan agar dapat diselesaikan dengan segera.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penjemputan atau pengumpulan data tindak lanjut hasil temuan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Hasil kegiatan ini adalah ditindaklanjutinya hasil pemeriksaan pemerintah Kota Sungai Penuh.

6.6 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan merupakan kegiatan berkala dimulai dengan pelaksanaan rakorwasda, rakorwasdanas dan Laporan Hasil Pengawasan secara berkala baik bulanan, triwulan, semesteran maupun Tahunan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk pemutakhiran data temuan hasil pengawasan baik ke tingkat nasional dan daerah sehingga data tersebut dapat dievaluasi secara berkala.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemutakhiran data tingkat nasional dan daerah, penyampaian Laporan Tindak Lanjut ke BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi termasuk juga dari Irjen Kementerian serta evaluasi hasil temuan APIP.

Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pemutakhiran data tingkat Nasional dan Daerah serta evaluasi hasil temuan APIP.

6.7 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan administrasi pengawasan yang transparan, tepat, cepat melalui pelayanan klinik konsultasi Inspektorat Kota Sungai Penuh yang berperan sebagai *consoultant* (konsultan) dan *early warning* (pemberi peringatan dini) yang memberikan pembinaan dan sosialisasi peraturan pada SKPD ataupun masyarakat lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Tujuan Kegiatan ini adalah menyediakan pelayanan klinik konsultasi sebagai wadah bagi SKPD, Aparat Pemerintah, dan masyarakat untuk mendapatkan penjelasan dan pembinaan atas implementasi peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah tamu klinik konsultasi Inspektorat Kota Sungai Penuh yang menunjukkan terlaksananya konsultasi pengawasan pada wilayah binaan Irban Wilayah dengan terbentuknya klinik konsultasi pengawasan. Sedangkan hasil (*Outcome*) kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan konsultasi pengawasan sehingga akuntabilitas kinerja dan keuangan serta terselesaikannya masalah sejak dini pada instansi binaan.

6.8 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Khusus

Kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat khusus dengan teridentifikasinya Pengaduan Masyarakat dan Walikota, serah terima jabatan SKPD, Dana BOS dan Pemeriksaan khusus lainnya.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi pengaduan dari masyarakat dengan fokus :

1. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Penyalahgunaan wewenang;

3. Hambatan dalam pelayanan publik;
4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

Selain dari pada itu termasuk kegiatan-kegiatan pengawasan khusus lainnya yang memerlukan pengawasan tersendiri berdasarkan permintaan Walikota.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeriksaan khusus Kas per triwulan, Sidak, PAD, SPM, fisik dan aset, serta pemeriksaan yang diminta langsung oleh walikota. Hasil kegiatan ini adalah tertanganinya pemeriksaan khusus.

6.9 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pelaksanaan pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasca reformasi yang diprakarsai penerbitan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperkuat dengan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan monitoring pelaksanaan Perpres No. 55 tahun 2012. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Monitoring Perpres 55 Tahun 2012.

6.10 Kegiatan Reviu LKPD Kota Sungai Penuh

Kegiatan reviu laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh merupakan kegiatan mereviu laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dan memberikan saran-saran

perbaikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan.

Tujuan kegiatan ini untuk mengarahkan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh agar tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. Keluaran kegiatan ini adalah pelaksanaan reviu laporan keuangan Kota Sungai Penuh. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya reviu laporan keuangan Kota Sungai Penuh.

6.11 Kegiatan Fasilitas Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)

Kegiatan Fasilitas Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) adalah kegiatan pengumpulan dan pengevaluasian Pajak-Pajak Pribadi PNS golongan III dan golongan IV di lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk kemudian hasilnya dikirimkan ke Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.

Tujuan kegiatan ini untuk mengumpulkan dan memeriksa LP2P PNS di lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh, serta memfasilitasi penyampaian LP2P ke Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.

Keluaran kegiatan ini adalah penelitian data LP2P seluruh PNS Kota Sungai Penuh Golongan III dan IV. Hasil kegiatan ini adalah terkirimnya LP2P PNS ke Mendagri dan Gubernur Jambi.

6.12 Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD

Kegiatan reviu LKj-IP bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Indikator dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan reviu LKj-IP SKPD dan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya dokumen Laporan Hasil Reviu LKj-IP SKPD dan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Kegiatan Evaluasi LKj-IP SKPD lingkup pemerintah Sungai Penuh merupakan kelanjutan dari kegiatan reviu atas kinerja instansi pemerintah untuk melihat kontribusi SKPD di lingkup Kota Sungai Penuh terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh

secara keseluruhan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengevaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah SKPD di lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh, dengan cara menelaah Renstra, sistem pengukuran kinerja, dan keandalan informasi kinerja yang disajikan LKj-IP, kemudian dilakukan evaluasi atas capaian kinerja program, kegiatan, dan sasaran, serta capaian maupun ketaatan terhadap perundang-undangan.

Tujuan kegiatan ini untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP), memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, dan menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi LKj-IP Kota Sungai Penuh.

Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya dokumen evaluasi LKj-IP Kota Sungai Penuh.

6.13 Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan PMPRB Daerah

Kegiatan ini adalah kegiatan untuk melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan:

- a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online
- b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi per triwulan
- c. Pembangunan zona integritas

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Keluaran kegiatan ini adalah PMPRB online, evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi per triwulan, dan pembangunan zona integritas. Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi per triwulan.

6.14 Kegiatan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini adalah kegiatan penilaian kinerja SKPD di lingkup Kota Sungai Penuh yang dilakukan dengan cara sistematis. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui kinerja SKPD di lingkup Kota Sungai Penuh sehingga menjadi bahan evaluasi bagi Kepala Daerah terhadap kinerja SKPD lingkup Kota Sungai Penuh.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja SKPD Kota Sungai Penuh. Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD.

6.15 Kegiatan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas pada tatanan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah antar SKPD lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan reviu RKA Perubahan dan RKA Murni SKPD Kota Sungai Penuh dan rasio KUA/PPAS. Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Hasil Reviu RKA SKPD, berdasarkan hasil reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA, dan KUA PPAS) dan reviu rencana kebutuhan barang milik daerah

6.16 Kegiatan Monitoring dan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada pimpinan oleh wajib lapor;
- b. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk sebagai koordinator LHKASN;
- c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah;
- d. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan monitoring dan verifikasi LHKASN Kota Sungai Penuh. Hasil kegiatan ini adalah

mengawasi kepatuhan atas penyampaian LHKASN dan kewajaran kepemilikan Harta Kekayaan ASN.

6.17 Kegiatan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui Belanja Modal dan Belanja Barang APBN/D Tahun 2016 yang telah dilakukan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA/DPA) pada Pemerintah Daerah.
- b. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA/DPA) Belanja Modal dan Belanja Barang APBN/D Tahun 2016 pada Pemerintah Daerah.
- c. Memberikan solusi/saran perbaikan dalam pelaksanaan lelang sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA/DPA) Belanja Modal dan Belanja Barang APBN/D Tahun 2016 pada Pemerintah Daerah.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan reviu pelaksanaan lelang sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA/DPA) yang dianggarkan dalam Belanja Modal dan Belanja Barang APBN/D TA 2016 per tanggal DIPA/DPA SKPD Kota Sungai Penuh. Hasil kegiatan ini adalah memastikan pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.18 Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah dan menghapus pungli, khususnya pada area:

- 1) Perizinan, dengan fokus:
 - a. Penerbitan izin mendirikan bangunan;
 - b. Penerbitan izin gangguan;
 - c. Penerbitan izin trayek;
 - d. Penerbitan izin pertambangan;
 - e. Penerbitan izin perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara;

- f. Rekomendasi tidak sengketa tanah; dan
 - g. Penerbitan izin usaha.
- 2) Hibah dan Bantuan Sosial, dengan fokus:
- a. Pencairan dana hibah dan bantuan sosial; dan
 - b. Pemotongan dana bantuan sosial.
- 3) Kepegawaian, dengan fokus:
- a. Mutasi pegawai;
 - b. Kenaikan pangkat;
 - c. Promosi Jabatan; dan
 - d. Pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan dan pegawai tidak tetap.
- 4) Pendidikan, dengan fokus:
- a. Pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - b. Pemotongan uang makan guru.
- 5) Dana Desa, dengan fokus;
- a. Pemotongan dana desa; dan
 - b. Pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa.
- 6) Pelayanan Publik, dengan fokus;
- a. Penyaluran beras miskin;
 - b. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan; dan
 - d. Pelayanan pada satuan administrasi anunggal satu atap (SAMSAT).
- 7) Pengadaan Barang dan Jasa, dengan fokus:
- a. Perencanaan pengadaan; dan
 - b. Penentuan pemenang.
- 8) Kegiatan lainnya yang mempunyai risiko penyimpangan.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Pemberantasan Pungutan Liar dan tersedianya laporan hasil pengawasan saber pungli yang dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri. Hasil kegiatan ini adalah menurunnya tingkat terjadinya pungutan liar di lingkup Kota

Sungai Penuh.

6.19 Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator dari hasil kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan indeks kepuasan masyarakat.

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tujuan program ini adalah untuk menghasilkan aparatur pengawasan yang profesional yang sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap objek pemeriksaan (Obrik).

Indikator Kinerja Program ini adalah Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan, adalah:

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Kegiatan ini adalah kegiatan yang memberikan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Fungsional Pengawas di Inspektorat Kota Sungai Penuh dalam bentuk Sertifikasi Tenaga Pemeriksa dan Pelatihan. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas SDM pemeriksa dan mempertajam kemampuan pegawai serta penyeragaman sistem pengelolaan tata administrasi dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya sertifikasi fungsional, *Workshop*, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan Penilaian Angka Kredit (PAK). Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan jabatan fungsional dan pengelolaannya.

8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program ini adalah program penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berjalan dengan tertib. Tujuan program ini untuk menata dan menyempurnakan kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan agar pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan tertib, terjadwal dan sikron dengan pemeriksaan APIP lainnya. Target capaian pada akhir tahun RPJMD adalah 85% dokumen kebijakan pengawasan yang dibutuhkan telah diterbitkan, yang menjadi bagian dari program pengawasan yang diprioritaskan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan:

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan ini adalah kegiatan penyusunan sistem dan prosedur pengawasan agar kegiatan pengawasan berjalan dengan tertib dengan melakukan penyusunan PKPT Inspektorat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertib, terjadwal, dan tersinkronisasi dengan pemeriksaan APIP lainnya, dan penyusunan SOP Teknis Pengawasan.

Tujuan kegiatan ini untuk menyusun sistem dan prosedur pengawasan agar kegiatan pengawasan berjalan dengan tertib. Keluaran kegiatan ini adalah:

- 1) tersusunnya PKPT Inspektorat untuk terlaksananya kegiatan pengawasan yang tertib, terjadwal dan tersinkronisasi dengan pemeriksaan APIP lainnya;
- 2) tersusunnya SOP teknis Pengawasan;
- 3) Terlaksananya peningkatan kapabilitas APIP.

Hasil kegiatan ini adalah tersusunnya PKPT inspektorat dan SOP teknis Pengawasan.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Sungai Penuh

Nama SKPD : Inspektorat Kota Sungai Penuh

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang				10.130.300.470,00	APBD II			10.868.330.419,00
4.02	Pengawasan				10.130.300.470,00	APBD II			10.868.330.419,00
4.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				785.798.400,00	APBD II			864.378.240,00
4.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Pengiriman Surat menyurat	Inspektorat	12 Paket	7.260.000,00	APBD II		12 Paket	7.986.000,00
4.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi (Telepon dan fax), internet, sumberdaya air dan listrik	Inspektorat	3 rekening kantor	120.000.000,00	APBD II		3 rekening kantor	132.000.000,00
4.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terperluhinya honor Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPK, PPTK, dan staf administrasi	Inspektorat	12 Honor jasa administrasi keuangan	120.000.000,00	APBD II		12 Honor jasa administrasi keuangan	132.000.000,00
4.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Inspektorat	26 peralatan kebersihan kantor	55.000.000,00	APBD II		26 peralatan kebersihan kantor	60.500.000,00
4.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK kantor	Inspektorat	52 Jenis ATK	44.275.000,00	APBD II		52 Jenis ATK	48.702.500,00
4.02.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya barang cetak kantor	Inspektorat	7 jenis pencetakan	44.907.500,00	APBD II		7 jenis pencetakan	49.398.250,00
4.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor	Inspektorat	4 Jenis alat listrik	8.446.000,00	APBD II		4 Jenis alat listrik	9.290.600,00
4.02.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	14 Jenis alat rumah tangga	30.122.400,00	APBD II		14 Jenis alat rumah tangga	33.134.640,00
4.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah, jurnal, buku pengetahuan umum dan buku perundang-undangan	Inspektorat	4 terbitan surat kabar/majalah, buku	24.420.000,00	APBD II		4 terbitan surat kabar/majalah, buku	26.862.000,00
4.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya logistik makanan dan minuman pegawai/tamu harian dan rapat	Inspektorat	6 jenis logistik dan makan minum harian makan rapat	37.950.000,00	APBD II		6 jenis logistik dan makan minum harian makan	41.745.000,00
4.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Inspektorat	10 orang kali rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan	265.848.000,00	APBD II		10 orang kali rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan	292.432.800,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat	6 honor jasa pendukung perkantoran	50.820.000,00	APBD II		6 honor jasa pendukung perkantoran	55.902.000,00
4.02.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kewargawala	Terlaksananya inventarisasi ADM kepegawaian, absensi, pembuatan SKP, pembuatan KP4, Terlaksananya Laporan Penjatuhan Disiplin serta penyediaan ID Card	Inspektorat	5 Laporan, 45 ID Card	71.219.500,00	APBD II		5 Laporan, 45 ID Card	78.341.450,00
4.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.953.367.750,00	APBD II			2.973.704.525,00
4.02.02.01	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	Inspektorat	10 Unit kendaraan dinas	199.045.000,00	APBD II		11 Unit kendaraan dinas	218.949.500,00
4.02.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Inspektorat	20 Unit	500.000.000,00	APBD II		20 Unit	300.000.000,00
4.02.02.03	Pengadaan Meubeler	Terpenuhinya kebutuhan meubeler kantor untuk kelancaran pelaksanaan aktivitas kantor	Inspektorat	20 unit	462.000.000,00	APBD II		20 unit	508.200.000,00
4.02.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	1 unit pemeliharaan (perbaikan pagar, atap dan lantai serta pengecatan kantor)	10.000.000,00	APBD II		1 unit pemeliharaan (perbaikan pagar, atap dan lantai serta pengecatan	11.000.000,00
4.02.02.05	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya penyediaan biaya BBM, pajak kendaraan dinas jabatan dan Penggantian suku cadang	Inspektorat	6 unit kendaraan dinas/operasional	126.525.300,00	APBD II		6 unit kendaraan dinas/operasional	139.177.830,00
4.02.02.06	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya inventaris kantor	Inspektorat	60 unit inventaris dan 1 paket suku cadang	11.802.450,00	APBD II		60 unit inventaris dan 1 paket suku cadang	12.982.695,00
4.02.02.07	Kegiatan Pengembangan Media data dan Informasi	Pengadaan jaringan internet, fax dan telepon, website Inspektorat	Inspektorat	2 paket	50.000.000,00	APBD II		2 paket	55.000.000,00
4.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur				30.250.000,00	APBD II			33.275.000,00
4.02.03.01	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	Inspektorat	55 orang	30.250.000,00	APBD II		55 orang	33.275.000,00
4.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				189.307.250,00	APBD II			208.237.875,00
4.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Umum, penyusunan program pelaporan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan regulasi peraturan terbaru	Inspektorat	17 orang kali	189.307.250,00	APBD II		17 orang kali	208.237.875,00
4.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				312.570.000,00	APBD II			343.827.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.06.05	Penyusunan Program dan pelaporan	Terlaksananya penyusunan LKJ-IP, Laporan realisasi program (bulanan, triwulan, dan tahunan), Laporan Evaluasi Renja, Laporan Keuangan, LPPD, LKPJ, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Inspektorat	7 jenis laporan/dokumen	114.070.000,00	APBD II		7 jenis laporan/dokumen	125.477.000,00
4.02.06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya penyusunan Renstra, Renja perubahan 2019, Renja 2020, PK, Laporan RKB, RKA Murni dan RKA	Inspektorat	6 jenis dokumen Perencanaan	198.500.000,00	APBD II		6 jenis dokumen Perencanaan	218.350.000,00
4.02.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				4.951.898.172,00	APBD II			5.447.087.991,00
4.02.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Reguler)	Terlaksananya Pemeriksaan Reguler pada sekolah (SD,SMP), Puskesmas, Bagian, Badan dan dinas serta pemerintahan Desa Lingkup Kota Sungai	Inspektorat	90 LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	1.344.620.175,00	APBD II		90 LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	1.479.082.193,00
4.02.20.02	Pelaksanaan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terbitnya laporan kasus pengaduan masyarakat dan aparat PNS atau laporan hasil audit investigatif, dan laporan monitoring pengaduan masyarakat melalui website pengaduan, kotak pengaduan, dan media massa	Inspektorat	7 LHP, 4 LHM	159.755.269,00	APBD II		1 LHP, 2 LHM	175.730.796,00
4.02.20.03	Kegiatan Pengendalian manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP SKPD/unit kerja	Inspektorat	4 LHE	159.000.000,00	APBD II		4 LHE	174.900.000,00
4.02.20.04	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terlaksananya pembuatan laporan ikhtisar Pemeriksaan per semester	Inspektorat	2 Laporan ikhtisar pemeriksaan	77.189.478,00	APBD II		2 Laporan ikhtisar pemeriksaan	84.908.426,00
4.02.20.05	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya pengumpulan/pengiriman data hasil tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Jambi, Inspektorat Kota Sungai Penuh, termasuk Irjen Kementerian	Inspektorat	4 Dokumen Tindak Lanjut	193.595.221,00	APBD II		4 Dokumen Tindak Lanjut	212.954.743,00
4.02.20.06	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya pemutakhiran data tingkat nasional dan daerah, serta berjalannya evaluasi hasil temuan APIP dan gelar pengawasan daerah	Inspektorat	4 kali pemutakhiran data Tk. Nasional/gelar pengawasan daerah (gelarwasda)	183.795.645,00	APBD II		4 kali pemutakhiran data Tk. Nasional/gelar pengawasan daerah (gelarwasda)	202.175.210,00
4.02.20.07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Terlaksananya konsultasi pengawasan pada wilayah binaan irban wilayah dengan terbantuannya klinik konsultasi	Inspektorat	5 Laporan (per-irban wilayah dan evalop)	89.970.469,00	APBD II		5 Laporan (per-irban wilayah dan evalop)	98.967.516,00
4.02.20.08	Pelaksanaan Pengawasan Khusus	Terlaksananya Pemeriksaan Tujuan tertentu dan pemeriksaan atas permintaan walikota	Inspektorat	70 LHP	505.500.000,00	APBD II		7 LHP	556.050.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.20.09	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi	jumlah diterbitnya Laporan Hasil Monitoring (Pemantauan) dan pengevaluasian kegiatan pelaksanaan pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi	Inspektorat	6 LHM	132.000.000,00	APBD II		6 LHM	145.200.000,00
4.02.20.10	Reviu LKPD Kota Sungai Penuh	Terlaksananya kegiatan Reviu Laporan Keuangan Kota Sungai Penuh yang memberikan keyakinan terhadap LKPD Kota Sungai Penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai	Inspektorat	1 LHR (Laporan Hasil Reviu)	185.221.490,00	APBD II		1 LHR (Laporan Hasil Reviu)	203.743.639,00
4.02.20.11	Facilitasi Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)	Terlaksananya verifikasi dan Entry Data LP2P seluruh ASN Kota Sungai Penuh golongan III dan IV	Inspektorat	4 berkas dokumen	127.558.046,00	APBD II		4 berkas dokumen	140.313.851,00
4.02.20.12	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Penyelesaian laporan Reviu, Evaluasi dan Tindak lanjut LKJ-IP SKPD lingkup Kota Sungai Penuh dan LKJ-IP Pemerintah Kota Sungai Penuh	Inspektorat	3 LHR, LHE, Laporan TL	253.894.387,00	APBD II		3 LHR, LHE, Laporan TL	279.283.826,00
4.02.20.13	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan PMPRB Daerah	Terlaksananya PMPRB online, evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertinewulan), dan pembangunan zona integritas	Inspektorat	3 jenis laporan	162.864.829,00	APBD II		3 jenis laporan	179.151.312,00
4.02.20.14	Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Inspektorat	4 LHE	133.000.000,00	APBD II		4 LHE	146.300.000,00
4.02.20.15	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Terlaksananya reviu RKA perubahan dan RKA murni SKPD Kota Sungai Penuh	Inspektorat	2 LHR	233.822.663,00	APBD II		2 LHR	257.204.929,00
4.02.20.16	Monitoring dan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan verifikasi LHKASN Kota Sungai Penuh	Inspektorat	2 LHM	198.000.000,00	APBD II		2 LHM	217.800.000,00
4.02.20.17	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	Inspektorat	4 LHR	165.000.000,00	APBD II		4 LHR	181.500.000,00
4.02.20.18	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Sungai Penuh	Terlaksananya sosialisasi Pemberantasan Pungutan Liar Kota Sungai Penuh	Inspektorat	10 Materi	352.000.000,00	APBD II		10 Materi	387.200.000,00
4.02.20.19	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan pbulik	Inspektorat	2 LHE	225.000.000,00	APBD II		2 LHE	247.500.000,00
4.02.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				676.108.898,00	APBD II			743.719.788,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya peningkatan SDM pengawasan, sertifikasi/penjenjangan karir tenaga fungsional serta terlaksananya Penilaian Angka Kredit (PAK) dan terlaksananya workshop Pengawasan Tenaga Fungsional	Inspektorat	25 kali diklat, 27 PAK, 4 materi workshop, 4 materi PKS	676.108.898,00	APBD II		20 kali diklat, 27 PAK, 4 materi workshop, 4 materi PKS	743.719.788,00
4.02.22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				231.000.000,00	APBD II			254.100.000,00
4.02.22.02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	tersusunnya PKPT Inspektorat untuk terlaksananya kegiatan pengawasan yang tertib, terjadwal dan tersinkronisasi dengan pemeriksaan APIP lainnya serta tersusunnya SOP teknis pengawasan	Inspektorat	1 dokumen PKPT, 1 dokumen Peta Audit dan 7 jenis dokumen SOP pengawasan dan dokumen pendukung kapabilitas APIP	231.000.000,00	APBD II		1 dokumen PKPT, 7 dokumen Peta Audit dan 7 jenis dokumen SOP pengawasan dan dokumen pendukung kapabilitas APIP	254.100.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan Inspektorat Kota Sungai Penuh memuat rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2019 berpedoman dan sejalan dengan RPJMD tahun 2016-2021 dan Renstra Inspektorat Kota Sungai Penuh tahun 2016-2021. Target Renstra Inspektorat Kota Sungai Penuh untuk tahun 2019 adalah :

1. Meningkatkan level Kapabilitas APIP yaitu pada Level 3
2. Nilai Maturitas SPIP pada level 3
3. Nilai Evaluasi LKj-IP Kota Sungai Penuh “BB”
4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD Kota Sungai Penuh

Untuk mencapai target tersebut, Inspektorat Kota Sungai Penuh membutuhkan dukungan pendanaan pada sarana dan prasarana dan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan tahun 2019.

Program dan kegiatan Inspektorat Kota Sungai Penuh untuk mendukung pencapaian target kinerja Inspektorat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - b. Pelaksanaan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
 - c. Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
 - d. Kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan
 - e. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - f. Evaluasi Berkala temuan hasil pengawasan
 - g. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
 - h. Pelaksanaan pengawasan khusus
 - i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi
 - j. Reviu LKPD Kota Sungai Penuh
 - k. Fasilitasi penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)

- l. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD
 - m. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan PMPRB Daerah
 - n. Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - o. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
 - p. Monitoring dan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
 - q. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa SKPD
 - r. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Sungai Penuh
 - s. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasa
 - a. Kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Organisasi
Sub Unit Organisasi

: 4.02.01
: 4.02.01.01

Inspektoret Daerah
Inspektoret Daerah

Pagu Indikatif (Rp) :
Prakiraan Mula (Rp) :

8.559.215.201,00
9.165.136.623,00

Kode	Uraian/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (2019)		Prakiraan Mula (2020)		SKPD	Jenis Kegiatan	Catatan Verifikasi
					Hasil Program	Target	Tolok Ukur	Target	APBD II	APBN	APBD II	APBN			
4.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Inspektoret			Tersedianya logistik makanan dan minuman pegawai/ tamu harian dan rapat	6 jenis logistik makanan dan minuman makan malam rapat	37.950.000,00	0,00	41.745.000,00	0,00	Inspektoret	Sedang Berjalan	
4.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Inspektoret			Tertelaksananya Rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 orang lebih rapat terkoordinasi dan konsultasi si dan konsultasi si selama 12 bulan	265.848.000,00	0,00	292.432.800,00	0,00	Inspektoret	Sedang Berjalan	
4.02.01.19	Penyediaan Jasa Pendidikan Administrasi Perkantoran			Inspektoret			Tersedianya jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran	6 honor jasa pendukung administrasi perkantoran	50.820.000,00	0,00	55.902.000,00	0,00	Inspektoret	Sedang Berjalan	
4.02.01.21	Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepagawean			Inspektoret			Tertelaksananya Inventarisasi ADM 45 ID kepegawean, absensi, pembuatan SKP, pembuatan KTP, Teraksanannya Laporan Pengajuan Disiplin serta penyediaan ID Card	5 Laporan, pelaksanaan peningkatan Disiplin Pegawai Card	71.219.500,00	0,00	78.341.450,00	0,00	Inspektoret	Sedang Berjalan	
4.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			1.359.372.750,00	0,00	1.245.310.025,00	0,00			
4.02.02.01	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional			Inspektoret			Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	10 Unit kendaraan dinas/ operasional	199.045.000,00	0,00	218.949.500,00	0,00	Inspektoret	Sedang Berjalan	
4.02.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Inspektoret			Tersedianya peralatan gedung kantor	20 Unit persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pengawasan dibandingan dengan jumlah kebutuhan sarana prasarana	500.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	Inspektoret	Sedang Berjalan	
4.02.02.03	Pengadaan Meubeler			Inspektoret			Tersedianya kebutuhan meubeler kantor untuk kelancaran pelaksanaan aktivitas kantor	20 unit persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana	462.000.000,00	0,00	508.200.000,00	0,00	Inspektoret	Sedang Berjalan	

Kode	Unsur/Bidang Unsur/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikator (2019)			Prakiraan Maja (2020)			SKPD	Jumlah Kegiatan	Catatan Verifikasi
					Hasil Program Tolok Ukur	Target	Keluaran Kegiatan Tolok Ukur	Target	Hasil Kegiatan Tolok Ukur	Target	APBD II	APBD I	APBN	Total		
4.02.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor			Inspektori			Pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 unit pemeliharaan (perbaikan atap dan lantai serta penggantian kantor)	Terpelihara dan terjaganya peralatan gedung kantor	12 Bulan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.000.000,00	Inspektori
4.02.02.05	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Inspektori			Terpelihara peralatan kendaraan dinas operasional	6 unit kendaraan dinas operasional	Terpelihara kendaraan dinas operasional	12 bulan	126.525.300,00	0,00	0,00	126.525.300,00	139.177.830,00	Sedang Berjalan
4.02.02.06	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor			Inspektori			Terpelihara inventaris kantor	50 unit inventaris kantor	Terjaganya kondisi dan keamanan inventaris kantor	12 Bulan	11.802.450,00	0,00	0,00	11.802.450,00	12.982.695,00	Inspektori
4.02.02.07	Kegiatan Pengembangan Media data dan informasi			Inspektori			Pengadaan jaringan internet, faks dan telepon, website Inspektori	2 paket jaringan internet, faks dan telepon, website	Terjaganya kondisi dan keamanan jaringan internet, faks dan telepon, website	90%	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	55.000.000,00	Sedang Berjalan
4.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Memperkuat Tata Kelola yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government			Calupan Peningkatan disiplin aparatur	100%			Terjaganya kondisi dan keamanan jaringan internet, faks dan telepon, website	100%	30.250.000,00	0,00	0,00	30.250.000,00	33.275.000,00	
4.02.03.01	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya			Inspektori			Terjaganya pakaian dinas dan perlengkapannya	55 orang	Terjaganya pakaian dinas aparatur	100%	30.250.000,00	0,00	0,00	30.250.000,00	33.275.000,00	Sedang Berjalan
4.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memperkuat Tata Kelola yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Governance and Clean Government			Calupan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%			Terjaganya kondisi dan keamanan jaringan internet, faks dan telepon, website	100%	189.307.750,00	0,00	0,00	189.307.750,00	208.237.875,00	
4.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Inspektori			Terjaganya Bimbingan teknis program pelaporan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan regulasi peraturan terbaru	17 orang kaki	Terjaganya Bimbingan teknis program pelaporan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan regulasi peraturan terbaru	85% dari jumlah pegawai terdidik pegawai	189.307.750,00	0,00	0,00	189.307.750,00	208.237.875,00	Sedang Berjalan

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikator (Rp) : 8.559.215.201,00
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.165.136.623,00

Kode	Unit/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Saaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikator (2019)			Prakiraan Maju (2020)			SUPO	Inis Kegiatn	Catatan Verifikasi
					Hasil Program	Hasil Kegiatan	Target	APBD II	APBD I	APBN	APBD II	APBD I	APBN			
4.02.20.03	Kegiatan Pengendalian manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH		Inspektorat	Inspektorat	Hasil Program Tolak Ular	Hasil Kegiatan Tolak Ular	80%	199.010.500,00	0,00	0,00	218.911.500,00	0,00	0,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.02.20.04	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan		Inspektorat	Inspektorat	Hasil Program Tolak Ular	Hasil Kegiatan Tolak Ular	100%	77.189.478,00	0,00	0,00	84.908.425,00	0,00	0,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.02.20.05	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Inspektorat	Inspektorat	Hasil Program Tolak Ular	Hasil Kegiatan Tolak Ular	80%	199.010.500,00	0,00	0,00	212.954.743,00	0,00	0,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.02.20.06	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		Inspektorat	Inspektorat	Hasil Program Tolak Ular	Hasil Kegiatan Tolak Ular	95%	183.795.645,00	0,00	0,00	202.175.210,00	0,00	0,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.02.20.07	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif		Inspektorat	Inspektorat	Hasil Program Tolak Ular	Hasil Kegiatan Tolak Ular	100 %	88.970.469,00	0,00	0,00	98.967.516,00	0,00	0,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.02.20.08	Pelaksanaan Pengawasan Khusus		Inspektorat	Inspektorat	Hasil Program Tolak Ular	Hasil Kegiatan Tolak Ular	95%	655.000.000,00	0,00	0,00	715.000.000,00	0,00	0,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikator (Rp) : 8.559.215.201,00
 Prakiraan Maju (Rp) : 9.165.136.623,00

Kode	Unsur/Bidang Unsur/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikator (2019)			Prakiraan Maju (2020)			SKPD	Jenis Kegiatan	Catatan Verifikasi
					Hasil Program Tolok Ukur	Hasil Kegiatan Tolok Ukur	Hasil Kegiatan Tolok Ukur	APBD II	APBD I	APBM	APBD II	APBD I	APBM			
4.02.20.09	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Inspektorat		Jumlah diterbitkannya Laporan Hasil Monitoring (Pemeriksaan) dan pengavalasian kegiatan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi	5 UMR	Meningkatnya capaian rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Sungai Penuh yang memenuhi kriteria singih memuaskan	132.000.000,00	0,00	0,00	145.200.000,00	0,00	0,00	145.200.000,00	Sidang Berjalan	
4.02.20.10	Revisi LKPD Kota Sungai Penuh		Inspektorat		Terlaksananya kegiatan Revisi Laporan Keuangan Kota Sungai Penuh yang memberikan keyakinan terbas terhadap LKPD Kota Sungai Penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan SPI yang memadai	1 UMR (Laporan Hasil Revisi)	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai dengan SAP dan SPI yang memadai	185.221.490,00	0,00	0,00	203.748.639,00	0,00	0,00	203.748.639,00	Sidang Berjalan	
4.02.20.11	Facilitasi Penyempaihan Laporan Pjake-Pjake Pribadi (LP2P)		Inspektorat		Terlaksananya verifikasi dan Entry Data LP2P seluruh ASN Kota Sungai Penuh golongan III dan IV	4 berkas dokumen	Meningkatnya jumlah PNS yang patuh menyampaikan LP2P dengan jumlah seluruh PNS ingkup Kota Sungai Penuh	127.558.046,00	0,00	0,00	140.313.851,00	0,00	0,00	140.313.851,00	Sidang Berjalan	
4.02.20.12	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD		Inspektorat		Penyediaan Laporan Renc, Evaluasi dan Tindak lanjut LK-IP SKPD lingkup Kota Sungai Penuh dan LK-IP Pemerintah Kota Sungai Penuh	3 UMR, LK-IP, Laporan TL	Meningkatnya nilai evaluasi LK-IP Kota Sungai Penuh menjadi kategori B	253.894.387,00	0,00	0,00	279.283.826,00	0,00	0,00	279.283.826,00	Sidang Berjalan	
4.02.20.13	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan PMPRB Daerah		Inspektorat		Terlaksananya PMPRB online, evaluasi perolek pelaksanaan reformasi birokrasi (pemerintahan), dan pembangunan zona integrasi	3 jenis laporan	Indeks nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kota Sungai Penuh kategori B (baik)	162.854.829,00	0,00	0,00	179.151.312,00	0,00	0,00	179.151.312,00	Sidang Berjalan	

Organisasi : 4.02.01 Inspektora Daerah : 4.02.01.01 Inspektora Daerah : 4.02.01.01
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektora Daerah : 4.02.01.01 Inspektora Daerah : 4.02.01.01
 Pagu Indikatif (Rp) : 8.559.215.200,00
 Praktiraan Maju (Rp) : 9.165.136.625,00

Kode	Unsur/Indikator Unsur/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Hasil Program		Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (2019)		Praktiraan Maju (2020)		SKPD	Jenis Kegiatan	Catatan Verifikasi
					Hasil Program Tolak Ujar	Target	Kelembutan Kegiatan Tolak Ujar	Target	APBD II	APBD I + APBD	APBD II	APBD I + APBD			
4.02.20.14	Evaluasi Kinerja Situasi Kerja Perangkat Daerah			Inspektora			Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	4 LHE	133.000.000,00	0,00	146.300.000,00	0,00	Inspektora	Sedang Berjalan	
4.02.20.15	Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD			Inspektora			Terlaksananya revisi RKA perubahan dan RKA mumi SKPD Kota Sungai Penuh	2 LHR	238.822.663,00	0,00	257.204.929,00	0,00	Inspektora	Sedang Berjalan	
4.02.20.16	Monitoring dan Verifikasi Laporan Harita Kelayaan Asaturat Sipil Negara (LHKASN)			Inspektora			Terlaksananya kegiatan Monitoring dan verifikasi LHKASN Kota Sungai Penuh	2 LHM	196.000.000,00	0,00	217.800.000,00	0,00	Inspektora	Sedang Berjalan	
4.02.20.17	Revisi Pengadaan Barang dan Jasa SKPD			Inspektora			Jumlah Laporan Hasil Revisi Pengadaan Barang dan Jasa pada SKPD	4 LHR	165.000.000,00	0,00	181.500.000,00	0,00	Inspektora	Sedang Berjalan	
4.02.20.18	Situasi Tugas Satu Bersih Penuh			Inspektora			Terlaksananya sosialisasi Pemberantasan Pungutan Liar Kota Sungai Penuh	10 (Materi)	352.000.000,00	0,00	387.200.000,00	0,00	Inspektora	Sedang Berjalan	
4.02.20.19	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik			Inspektora			Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	2 LHE	225.000.000,00	0,00	247.500.000,00	0,00	Inspektora	Sedang Berjalan	
4.02.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemfisa dan aparatur pemerintahan				A. Persentase tenaga apar yang bersertifikat b. 2 Meningkatkan level kapabilitas apar kota sungai penuh				676.108.898,00	0,00	745.719.788,00	0,00			

Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah

Pagu Indikatif (Rp) : 8.559.215.201,00
 Praktekan Maju (Rp) : 9.165.136.623,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (2019)				Praktekan Maju (2020)				SNPD	Jenis Kegiatan	Catatan Verifikasi
					Hasil Program Tokoh Uluar	Target	Indikator Kinerja Tokoh Uluar	Target	Hasil Kegiatan Tokoh Uluar	Target	APBD II	APBN	Total	APBD II	APBN	Total			
4.02.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas			Inspektort			Terlaksananya 23 kali pelatihan SDM didat. 27 PAK 4 Fungsional yang memiliki sertifikat/penjenjihan/ workshop sertifikasi sesuai standar tenaga fungsional p. 4 kompetensi materi JEA/JFZUPD PKS dengan total APBP	80%			676.108.898,00	0,00	676.108.898,00	743.719.788,00	0,00	743.719.788,00	Inspektort	Sedang Berjalan	
4.02.22	Program penguatan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Memperkuat Kualitas Kendudukan Masyarakat Yang Religius Pada Berwawasan Ilmu Saurth Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Meningkatnya Pergambilan Keputusan yang Religius Pada Berwawasan Ilmu Saurth Pengetahuan dan Teknologi, Religius, Sehat, dan Berbudaya	Inspektort	Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (jumlah)	8					231.000.000,00	0,00	231.000.000,00	254.100.000,00	0,00	254.100.000,00			
4.02.22.02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			Inspektort			Tersusunnya PKPT 1 Inspektort untuk melaksanakan tugas pengawasan yang terdistribusi dan tersinkronisasi dengan pemeriksaaan APBP lainnya serta tersusunnya SOP teknis pengawasan	90 %			231.000.000,00	0,00	231.000.000,00	254.100.000,00	0,00	254.100.000,00	Inspektort	Sedang Berjalan	
TOTAL ANGGARAN (Rp.)											8.757.215.201,00	0,00	8.559.215.201,00	9.387.936.623,00	0,00	9.165.136.623,00			

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Sungai Penuh Tahun 2019 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2016-2021, dalam Rencana Kerja Tahun 2019 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2019 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kota Sungai Penuh, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2019. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Sungai Penuh pada umumnya.

Sungai Penuh,

2018

INSPEKTUR



SUHATRIL, SH, Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19720515 199602 1 001

**Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Target Sasaran
Tahun 2016-2021**

Inspektorat Kota Sungai Penuh

Visi :					
Menjadi Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Kota Sungai Penuh yang Memiliki Kapabilitas APIP yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Kota Sungai Penuh Yang Cerdas (CENDIKIA, ENTREPRENEUR, RELIGIUS, DAYA SANGAT, ADIL DAN SEJAHTERA) 2021					
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Strategi	Arah Kebijakan
1) Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat pengawasan	1) meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dapat berperan sebagai catalyst (katalisator), consulting partner (konsultan), dan quality assurance (penjamin mutu);	1) meningkatkan kompetensi dan pemahaman APIP tentang dasar dan teknik pengawasan	1) Peningkatan Level Kapabilitas APIP	1) Penataan dan penguatan pemahaman aparat pengawasan tentang dasar dan teknis pengawasan secara berkelanjutan	1) melaksanakan sertifikasi jabatan fungsional tertentu dan pendidikan/pelatihan/sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan
		2) Meningkatkan kualitas laporan hasil pengawasan	2) Tersedianya sistem dan prosedur yang menjadi acuan pelaksanaan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan (persentase jumlah sistem dan prosedur pengawasan yang telah diterbitkan atau dievaluasi dibandingkan dengan jumlah sistem dan prosedur yang dibutuhkan)	2) Penataan sistem dan prosedur pengawasan berbasis risiko	2) penyusunan norma, standar dan prosedur pengawasan berbasiskan risiko
2) Mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;	2) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	3) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang taat pada hukum dan peraturan;	3) Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	3) Pemanfaatan hasil pengawasan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam rangka menurunkan jumlah temuan yang berindikasi merugikan keuangan daerah dan negara,
		4) Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang tepat waktu;	4) Persentase peningkatan jumlah PNS yang menyampaikan LP2P dibandingkan dengan jumlah seluruh PNS lingkup Kota Sungai Penuh	4) persentase jumlah ASN yang telah dipantau dan diverifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dibandingkan jumlah ASN Kota Sungai Penuh	4) terlaksananya pemantauan dan verifikasi LP2P PNS di lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh, serta memfasilitasi penyampaian LP2P ke Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri
			5) Persentase jumlah SKPD yang direvisi RKANya dibandingkan dengan total SKPD Kota Sungai Penuh	5) Persentase jumlah SKPD yang direvisi RKANya dibandingkan dengan total SKPD Kota Sungai Penuh	5) pengawasan dan pembinaan atas kegiatan penganggaran dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
			6) Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang tepat waktu;	6) Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan BPK RI dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan BPK RI	6) mengembangkan sistem informasi pengawasan dan pengolahan data hasil temuan pengawasan
					3) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		5) Terwujudnya birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani dengan terciptanya sistem pengendalian intern yang memadai pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;	10) persentase jumlah SKPD yang nilai SPIP di level 3 kategori "terdefinisi" dibandingkan total jumlah SKPD yang dievaluasi SPIPnya	5) pengintegrasian SPIP di seluruh SKPD Kota Sungai Penuh	7) Pemantauan dan evaluasi penerapan SPIP yang berkelanjutan pada SKPD lingkup Kota Sungai Penuh	
			11) Persentase LKPD SKPD yang telah memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan rekomendasi Inspektorat Kota dibandingkan dengan LKPD SKPD yang direviu	6) Rekomendasi Reviu LKPD memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD sesuai dengan SPI yang memadai dan SAP	8) peningkatan SPIP dalam penyusunan LKPD dan pembuatan LKPD dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP	
			12) Indeks nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kota Sungai Penuh kategori B (Baik) (sumber data Penilaian PMPRB Kemempian dan RB)	7) Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	9) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh	
			13) Persentase Capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Sungai Penuh memenuhi kriteria sangat memuaskan			
		6) Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;	14) persentase jumlah SKPD yang menerima nilai dengan kategori "sangat tinggi" dari hasil penilaian evaluasi kinerja	8) Pengawasan atas akuntabilitas kinerja SKPD lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh	10) Pelaksanaan penilaian kinerja yang berkesinambungan terhadap seluruh SKPD untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh SKPD	
			15) persentase jumlah SKPD yang mendapat nilai evaluasi LKJ-IP kategori B dibandingkan dengan total jumlah SKPD yang dievaluasi			
			16) persentase pelayanan kasus pengaduan yang ditindak lanjut dalam 14 (empat belas) hari dibandingkan dengan seluruh pengaduan masyarakat yang diterima.	9) meningkatkan peran serta masyarakat dan SKPD dalam pengawasan pembangunan Kota Sungai Penuh	11) Meningkatkan penanganan kasus pengaduan yang diterima dari aparat pemerintah dan masyarakat	
					12) meningkatkan kemudahan akses pengaduan masyarakat melalui media website Dumas Inspektorat Kota Sungai Penuh dan Kotak Pengaduan Inspektorat Kota Sungai Penuh	
		7) Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan SKPD dan masyarakat lingkup Pemerintahan Kota Sungai Penuh;	17) Persentase peningkatan pelayanan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif untuk pencegahan dini terjadinya penyimpangan (perbandingan SKPD yang dilayani saat konsultasi dengan SKPD yang datang untuk konsultasi)	10) meningkatkan administrasi pengawasan yang transparan, tepat, cepat melalui pelayanan inspektorat yang berperan sebagai <i>consultant</i> (konsultan) dan <i>early warning</i> (peringatan dini)	13) melakukan pembinaan dan pemberian jasa konsultasi mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KERANGKA KEBUTUHAN DANA
INSPEKTORAT KOTA SUNGAI PENUH 2016 – 2021**

INSPEKTORAT KOTA SUNGAI PENUH 2016 – 2021																	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
Target dan Kerangka Pendanaan																		
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2015		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		K	Rp.	K	Rp.
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya level Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kota Sungai Penuh	1	1	535.977.000,00	2	716.980.000,00	3	788.678.000,00	3	867.545.800,00	4	954.300.380,00	4	1.049.730.418,00	4	4.913.211.598,00		
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1) Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan (BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota) 2) Penilaian Kinerja SKPD (Rapor)	70,92%	70,92%	3.300.814.950,00	70%	3.737.096.950,00	75%	4.110.806.645,00	77%	4.521.887.309,50	78%	4.974.076.040,45	78%	5.471.483.644,50	78%	26.116.155.539,45		
		52,63%	52,63%	220.000.000,00	98%	242.000.000,00	98%	266.200.000,00	98%	292.820.000,00	98%	322.102.000,00	98%	354.312.200,00	98%	1.697.434.200,00		
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	70,00%	75%	179.594.000,00	78%	151.662.500,00	80%	166.828.750,00	82%	183.511.625,00	83%	201.862.787,50	85%	222.049.066,25	85%	1.105.508.728,75		
Jumlah				4.236.385.950,00		4.847.739.450,00		5.392.513.395,00		5.865.764.734,50		6.452.341.207,95		7.097.575.328,75		33.832.320.066,20		

**REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM RPJMD
INSPEKTORAT KOTA SUNGAI PENUH 2016 – 2021**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Akhir RPJMD		Realisasi 2016 s.d. 2021		Tingkat Capaian Kinerja 2016 s/d. 2021 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya level Kapabilitas APJP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kota Sungai Penuh	4	4.913.211.598,00	2	899.014.300,00	50,00%	18,30%
	Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan (BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota)	100,00%	20.892.932.431,56	70,92%	8.422.585.226,00	70,92%	40,31%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penilaian Kinerja SKPD (Rapor)	Rapor Kuning	2.611.616.553,94	Rapor Biru	358.122.900,00	93,02%	13,71%
	Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	49	1.105.508.728,75	23	466.444.000,00	46,94%	42,19%
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan							